

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANGGUHAN VFA OLEH RODRIGO DUTERTE

3.1 Kuasa Duterte Dalam Pemerintahan Filipina

Rodrigo Duterte lahir di Massin, Leyte Selatan, Filipina, 28 Maret 1945. Rodrigo yang berjuluk Digong, lahir dari pasangan Cebuano Vicente G. Duterte dan Soledad Roa Duterte. Vicente, Ayah Presiden Rodrigo Duterte, adalah pengacara yang juga menjabat sebagai Gubernur Davao. Sebelum menjadi gubernur, Ayah Rodrigo Duterte adalah seorang guru sekolah dan menjabat sebagai kepala dinas. Selain menjadi Gubernur, Ayah Rodrigo juga pernah menjadi Walikota Danao di Cebu.¹

Rodrigo Duterte kemudian menjadi Presiden Filipina pada tanggal 30 Juni 2016. Duterte mengalahkan lima kandidat calon Presiden Filipina diantaranya Manuel Roxas, Grace Poe, Miriam Santiago dan Jejomar Binay. Dengan rival terberatnya adalah Mar Roxas.²

Rodrigo Duterte berumur 71 tahun saat menjabat sebagai Presiden ke-16 dan didampingi oleh Leni Robredo sebagai Wakil Presidennya. Dalam pidato pelantikannya Duterte bertekad untuk membersihkan Filipina dari para penjahat dalam enam bulan pertama dari masa jabatannya. Duterte akan bertindak tegas untuk memerangi narkoba dengan caranya yang terbilang tangan besi. Perang melawan narkoba ini pun terus dipertahankan dan tanpa henti menjadi agenda utama dalam politik nasionalnya.³

Pasca kemenangannya dalam pemilu presiden Filipina, Rodrigo Duterte kemudian mulai mengkonsolidasikan kekuatan dalam bidang keamanan dengan mengikutsertakan masyarakat umum dan institusi terkait untuk turut andil dalam mengatasi isu narkoba di Filipina. Dalam *War on Drugs*, salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak kebijakan Duterte ini adalah *Philippine Drug Enforcement Agency* (untuk selanjutnya disingkat PDEA). Institusi ini didirikan sejak 7 Juli 2002 yang berpusat di Quezon. Pada rezim sebelumnya PDEA kurang optimal dalam menjalankan fungsinya karena adanya tumpang tindih peran dengan Kepolisian Nasional Filipina, kemudian ketika Duterte menjabat, PDEA

¹ Cleve V. Arguelles, 2019. *Beyond Will and Power: A Biography of President Rodrigo Roa Duterte*

² *ibid*

³ *ibid*

mengalami revitalisasi dimana institusi ini langsung berada di bawah pengawasan presiden sebagai kepala institusi dan angkatan bersenjata tertinggi Filipina.⁴

Janji atau program Duterte mengenai pemberantasan narkoba ini telah menjadi prioritas utama Duterte. Program ini menjadi pro-kontra di Filipina ataupun bagi masyarakat internasional. Hal yang dilakukan Rodrigo Duterte untuk memberantas para pengguna narkoba dengan cara memberlakukan kembali pasal *Republic Act 9145* yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 50.000 peso sampai 10.000.000 peso.⁵

Keberadaan pemimpin memiliki peranan penting dalam pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi kepemimpinan Rodrigo Duterte. Keberadaan Duterte dalam *War on Drugs* mampu memainkan peranan penting dalam memprioritaskan persoalan keamanan ini dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Dalam kampanye-kampanye Duterte menyatakan bahwa *security first* atau kebijakan keamanan yang di dahulukan untuk dapat menjamin kelangsungan pembangunan di Filipina.

Sebagai seorang presiden, Duterte juga merupakan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata di Filipina. Sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya. *War on Drugs* yang merupakan suatu kebijakan yang berada dalam pemerintahannya dan mempunyai dasar pelaksanaan yaitu *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016* tentang *Philippines National Police Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* (CMC No. 16-2016) tertanggal 1 Juli 2016. Pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk memberantas obat-obatan terlarang selama enam bulan pertama masa jabatannya merupakan salah satu dasar disusunnya CMC No. 16-2016.⁶ Sehingga Presiden Duterte mempunyai pengetahuan akan dilaksanakannya pemberantasan obat-obatan terlarang oleh Polisi Nasional Filipina.⁷

Dalam perkembangan kebijakannya yang kontroversi sebagai presiden Filipina, rencananya menghancurkan para pelanggar hukum di seluruh negeri secara umum mirip dengan caranya menangani pelanggar hukum di Kota Davao saat dia menjabat sebagai walikota. Rodrigo Duterte tidak terlalu memperhatikan

⁴ Michael Bueza. 2017. IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs'.

<http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs>.

⁵ Pia Ranada. 2016. Duterte Shows 'Drug List' with '1,000' Names of Gov't Officials.

<https://www.rappler.com/nation/146359-duterte-shows-drug-list-1000-names>.

⁶ Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 tentang PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"

⁷ Amnesty International Limited. 2016. "Philippines: Duterte's 100 days of carnage".

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>

permasalahan Hak Asasi Manusia, siapapun dari rakyat Filipina yang menjadi pengedar narkoba, perampok, Rodrigo Duterte menyarankan untuk henggang dari Filipina, jika tidak akan dijatuhi hukuman mati.

Namun sebanyak apapun bahasa-bahasa yang diucapkan Rodrigo, sama sekali tidak membuat pendukungnya berbalik arah. Para pendukung Rodrigo juga tidak hirau dengan julukan kejam yang dilabelkan terhadap sosok Rodrigo. Slogan *'change is coming'* atau perubahan akan datang yang dikampanyekan membuat pendukungnya semakin bertekad melaksanakan perintah presiden Rodrigo Duterte.

Setahun setelah dilangsungkannya kebijakan pemberantasan narkoba atau *war on drugs* ini, Terbukti kurang lebih sekitar 5.000 jiwa tewas dengan di tembak mati di tempat saat penangkapan. Protes dari aksi pemberantasan narkoba ini tidak hanya direspon oleh masyarakat internasional akan tetapi protes juga dilayangkan dari masyarakat Filipina, bahkan seorang jaksa yang bernama Jude Sabio melaporkan aksi dari pemberantasan narkoba yang di lakukan oleh otoritas setempat Filipina kepada ICC (*International Criminal Court*) laporan ini dilayangkan pada tanggal 24 April 2017.⁸

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa *War on Drugs* menjadi kebijakan keamanan yang tidak lepas dari posisi Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang secara otomatis membuat Rodrigo Duterte memiliki kewenangan yang begitu besar terhadap insitusi-insitusi dalam negeri Filipina, termasuk militer dan kepolisian nasional Filipina. Kebijakan *war on drugs* ini pada akhirnya dijalankan Rodrigo Duterte untuk mendukung pencapaian kepentingannya yang sejalan dengan kepentingan nasional.

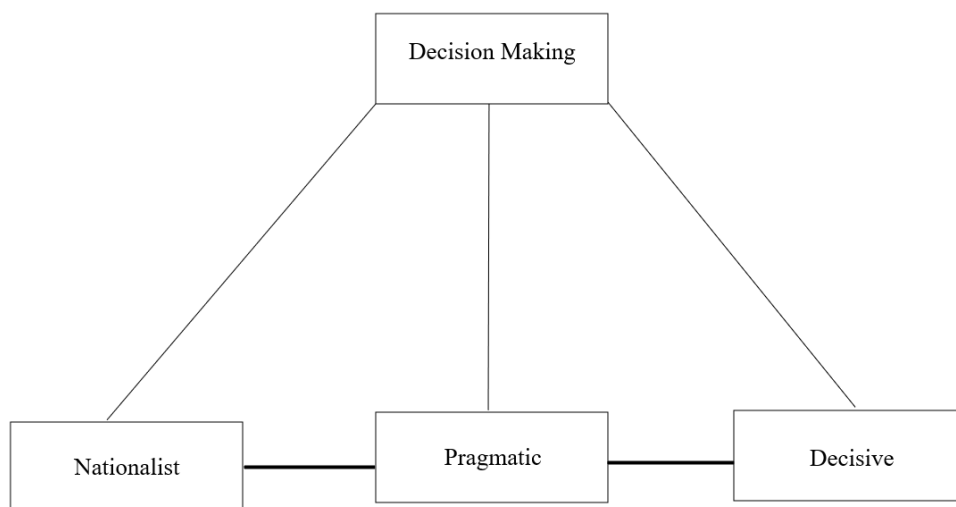
3.2 Aspek Kognitif

Menurut teori poliheuristik, pengambilan keputusan pada individu mempertimbangkan pilihan alternatif yang berbeda dalam membuat sebuah keputusan. Dimana pada tahap pertama dalam teori poliheuristik terdapat pilihan yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola pikir pengambil keputusan. Pilihan ini didasarkan pada pemikiran kognitif yang dapat berasal dari latar belakang pengambil keputusan, riwayat pendidikan, serta keputusan politiknya di masa lalu. Tahap pertama cenderung berbasis pada pengalaman pengambil keputusan di masa lalu dan di limitasi oleh pengalaman kepemimpinan pengambil keputusan.

⁸ Cabato Regine, 2019. "Thousands dead. Police accused of criminal acts. Yet Duterte's drug war is wildly popular." Diakses pada;
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thousands-dead-police-accused-of-criminal-acts-yet-dutertes-drug-war-is-wildly-popular/2019/10/23/4fdb542a-f494-11e9-b2d2-1f37c9d82dbb_story.html

Selanjutnya pada tahap kedua keputusan bulat ditentukan. Dipengaruhi oleh penasihat dan observasi para ahli tentang pilihan pemimpin di tahap pertama. Pada tahap kedua merupakan hasil evaluasi menjadi pilihan terbaik yang nantinya akan menjadi pilihan yang aman secara politik dan mampu memaksimalkan keuntungan dari fenomena yang terjadi.⁹

Gambar 3.1



Berdasarkan teori poliheuristik aspek kognitif adalah proses dimana pola pikir dan pengalaman yang berfungsi sebagai pembentuk keputusan. Aspek kognitif melibatkan proses mental dan persepsi sensorik yang mana meliputi berpikir, mengetahui, mengingat, menilai, dan memecahkan masalah. Saat mengambil keputusan, individu cenderung memiliki kebutuhan kognitif yang lebih besar, lebih memperhatikan informasi yang masuk, lebih memilih pemrosesan poliheuristik daripada sistematis, dan menangani informasi yang berlebihan dengan lebih baik.¹⁰

Untuk mempelajari aspek kognitif Rodrigo Duterte, maka perlu menganalisis kepribadiannya baik dari segi profil, karir politik hingga kebijakan-kebijakan selama ia menjabat sebagai Walikota Davao dan Presiden Filipina. Dari aspek-aspek tersebut akan terlihat bagaimana sebuah pola kognitif yang menjadi alasan Rodrigo Duterte merumuskan kebijakan dalam negeri atau menghadapi isu

⁹ Emilie M. Hafner-Burton, D. A. (2013, May). The Cognitive Revolution and the Political Psychology of Elite Decision Making. Volume 11 Issue 2.

¹⁰ *ibid*

internasional. Aspek kognitif dalam Rodrigo Duterte ini nantinya akan mempengaruhi segala tindakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina.

Pertama ada karakter nasionalisme Rodrigo Duterte yang kuat dipengaruhi dari lingkungan keluarganya yang merupakan politisi di tingkat daerah ataupun nasional. Seperti ayahnya, Vicente Duterte pernah menjadi walikota, gubernur, dan pemerintah pusat. Pengaruh Vicente ini menular kepada Duterte. Kehidupan Vicente sebagai politisi mendasari pemikiran atau pola pikir Rodrigo Duterte tentang struktur politik di Filipina.

Di awal pemerintahannya, Rodrigo Duterte melakukan apa yang tidak dilakukan oleh presiden Filipina lainnya dimana Duterte dengan jelas mengumumkan niatnya untuk mengikuti kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

Di luar kritik pribadi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap kampanye anti-narkobanya terdapat rasa nasionalis yang lebih dalam dimana hal ini berakar pada sejarah Duterte sebagai orang Mindanao. Duterte mencoba mewakili kebencian Mindanao terhadap imperialisme Amerika Serikat nyaris 150 tahun yang lalu di Filipina. Desakan nasionalis Duterte dapat dilacak ke siklus narasi rezimnya yang berfungsi sebagai media untuk kelangsungan dan perubahan melalui mobilisasi gagasan pada tingkat diskursif. Dengan menghidupkan kembali nasionalisme anti-AS-nya Duterte menolak narasi reformis liberal presiden-presiden Filipina sebelumnya.¹¹

Duterte juga menjalankan pendekatan yang berbalik dari posisi kebijakan luar negeri anti-Tiongkok yang kuat dan sangat pro-Amerika dari pendahulunya. Dengan Tiongkok menjadi kekuatan global dan mengikuti pergeseran politik global menuju kawasan Asia Pasifik, Filipina muncul sebagai pemain kunci dalam perjuangan supremasi antara negara-negara Asia Pasifik. Dengan demikian, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memainkan peran penting dalam hal perebutan kekuasaan Asia Tenggara. Peneliti menemukan bahwa dalam membangun hubungan Filipina-Tiongkok Rodrigo Duterte perlahan mendekonstruksi kemitraan lama Filipina dengan AS. Kebijakan Duterte di Filipina menghasilkan pendekatan neorealis defensif untuk hubungan Internasional.¹²

Berdasarkan aspek kognitif ini Rodrigo Duterte merupakan seseorang yang nasionalis, kebijakan *War on Drugs* dilancarkan dengan maksud untuk menyelamatkan generasi muda Filipina. Duterte juga seseorang yang tidak tunduk oleh siapapun, Ia mempunyai prinsip yang kuat dan keras kepala. Duterte tidak

¹¹ Arguelles, C. V. (2020). *Beyond Will and Power: A Biography of President Rodrigo Roa Duterte*, Earl G. Parreño. Lapu-lapu City: Optima Typographics. *Philippine Journal of Public Policy*.

¹² *ibid*

peduli dengan kritikan ataupun komentar dari pihak luar, Duterte hanya ingin kedaulatan Filipina tidak terganggu dan bebas berencana sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Kedua adalah pragmatis dimana pribadi ini terbentuk dari pengalaman karir politik Rodrigo Duterte. Berdasar dari pengaruh dan janji kampanye yang mengatakan “*change is coming,*” *change is coming* yang mengartikan untuk Filipina yang lebih maju dan prioritasnya pada kebijakan domestik. Meski dampak dari kebijakannya akan menjauhkannya dari hubungan-hubungan diplomatik dengan negara lain, akan tetapi, Duterte menginginkan prioritas domestiknya bisa terlaksana.¹³

Selama kampanye pemilihan presiden, Duterte mengadopsi wacana yang didominasi kebijakan-kebijakan populis karena Duterte perlu mendapatkan orang-orang di sisinya. Namun, segera setelah menjabat sebagai presiden, wacana dan keputusannya mulai menjadi lebih pragmatis dalam menghadapi tantangan serius yang dihadapi negara terutama dalam kebijakan luar negerinya. Misalnya, Duterte mengetahui tentang konsekuensi nyata dari aliansi yang semakin tidak dapat diandalkan dengan Amerika Serikat terlebih setelah kritik Obama pada tahun 2016 dan pencabutan visa salah satu pejabat pemerintahannya yang terlibat dalam *war on drugs* dan mengadopsi pendekatan praktis untuk menghadapi tantangan ini.¹⁴

Kekhawatiran Duterte juga dihasilkan dari fakta bahwa Bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat ke Filipina menurun antara 2010 dan 2015, dan bahwa Amerika Serikat tampaknya mempertanyakan *Mutual Defense Treaty* yang sudah lama ada. Duterte juga prihatin dengan Amerika Serikat yang tidak mempertimbangkan Pulau Spratly dan Beting Scarborough sebagai bagian dari wilayah Filipina dan sebagai konsekuensinya tidak mempertimbangkan bahwa ia harus membela mereka secara terang-terangan. Duterte dan sebagian besar pembuat kebijakan Filipina dibiarkan dengan kesadaran bahwa Amerika Serikat telah mengecewakan Filipina.¹⁵

Mengingat bahwa AS tidak dapat dilihat sebagai sekutu yang dapat diandalkan lagi, Duterte menunjukkan pragmatismenya dengan mengkompensasi kerugian ekonomi dan keamanan yang diwakili secara praktis: menggeser aliansi Filipina ke arah Timur, yaitu Tiongkok dan Rusia

¹³ Teehankee, J. C. (2016). The Early Duterte Presidency in the Philippines. Duterte’s Resurgent Nationalism in the Philippines: A Discursive Institutionalism .

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

Ketiga adalah *Decisive*. *Decisive* disini memiliki arti bahwa Rodrigo Duterte selalu berusaha memberikan pukulan telak terhadap lawan politiknya. Duterte telah menantang seluruh kalangan yang terlibat dengan tindak pidana kejahatan dan peredaran narkoba bahwa Duterte akan memburu orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut sampai ke akar-akarnya. Bahkan Duterte mengancam para aparaturnegara yang terlibat dengan hal tersebut. Semua kata-katanya selalu dibuktikan dengan tindakan nyata.¹⁶

Inilah yang membuat Davao menjadi kota yang sangat aman selama Rodrigo Duterte menjabat. Di awal kepemimpinannya beliau sudah mengancam para oknum pejabat negara, parlemen, dan kepolisian yang berkolaborasi dan terkait dengan narkoba.

Hal ini menunjukkan karakter kuat dan keberanian Duterte yang luar biasa. Bahkan beliau abai terhadap berbagai kritikan dalam dan luar negeri berkaitan dengan tindakan beliau yang cenderung dipandang melanggar hak asasi manusia.

Tindakan *Decisive* ini juga terlihat pada kebijakan *war on drugs*, dimana Duterte sesekali selalu ikut dengan tim patroli untuk mengontrol jalannya kebijakan tersebut. Fenomena ini cukup menggambarkan bahwa Duterte yakin dengan ide dan pemikirannya akan membawa pengaruh yang baik dan mencoba untuk memangkas ketimpangan ekonomi yang terjadi di Filipina.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Rodrigo Duterte merupakan seorang pemimpin tangan besi dimana segala jalan akan ditempuh dengan caranya. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pemegang jabatan tertinggi di Filipina, Duterte memutuskan kebijakan dengan cara yang *do or die*. Artinya, Duterte tidak ingin diganggu, Ia memutuskan kebijakan harus terlaksana atau tidak sama sekali.

3.3 Aspek Rasionalis

Berdasarkan teori poliheuristik rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio (akal) adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria rasionalisme berbasis pada intelektualitas. Oleh karenanya strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia.

Untuk mempelajari aspek rasional Rodrigo Duterte dalam membuat keputusan, maka perlu menganalisis faktor-faktor eksternal yang menjadi

¹⁶ CHANCO, C. (2016, Februari). Rodrigo Duterte's One-Man Revolution. Retrieved from jacobin: <https://jacobin.com/2016/02/duterte-philippines-election-maoists-cpp-marcos-death-squads/>

pertimbangan Rodrigo Duterte dalam membuat keputusan, hal ini meliputi saran, anjuran, atau bahkan penolakan lawan politik Rodrigo Duterte di Filipina, juga respon Amerika Serikat dalam kasus *War on Drugs* dan VFA. Aspek rasional dalam Rodrigo Duterte ini nantinya akan mempengaruhi segala tindakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina.

Yang **pertama** ada masalah penanggulangan narkoba di Filipina menjadi fokus utama pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte. Bahkan kampanye *War on Drugs* yang dibawa saat pencalonannya dapat memenangkan Duterte sebagai Presiden Filipina terpilih. Dengan perolehan suara sebanyak 16,601.997, Duterte memiliki selisih lebih dari 6.6 juta dukungan dengan rival terdekatnya.¹⁷

Pasca Pemilihan Presiden Filipina dan terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden baru Filipina ke 16 terjadi suatu perubahan besar dalam politik dalam negeri Filipina. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan Duterte dalam menunaikan janji-janji politiknya pada saat masa Pemilihan Presiden tahun 2016. Dalam waktu relatif singkat Duterte berhasil menekan tingkat kriminalitas di Filipina, perbaikan layanan publik, dan kestabilan perekonomian Filipina. Meskipun dalam pelaksanaan kebijakannya menimbulkan kontroversial dan kecaman dunia internasional terutama dalam kebijakan *War on Drugs* yang mengizinkan adanya *Extrajudicial Killing* terhadap pengguna dan pengedar narkoba.¹⁸

Berkat beberapa keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umum di Filipina, Presiden Duterte memiliki tingkat kepuasan publik dan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Sikap tegas dan kerasnya terhadap pemimpin-pemimpin Barat terhadap kritik dan campur tangan mereka terhadap kebijakan dalam negeri Filipina membuat Presiden Duterte sangat disukai oleh rakyat Filipina.

Pada tahun 2019, sebanyak 82% masyarakat Filipina memberikan penilaian *excellent* untuk kampanye *War on Drugs* yang telah dilakukan selama tiga tahun masa kepemimpinannya. Masyarakat yang tidak puas terhadap kampanye *War on Drugs* sebanyak 12%, dan 6% sisanya abstain. Survei tersebut ditujukan kepada 1.200 masyarakat Filipina melalui *Social Weather Stations*, sebuah institusi independen yang memiliki fungsi keilmuan dan sosial.¹⁹

¹⁷ BBC, Philippines election: Maverick Rodrigo Duterte wins presidency, dikutip dari: <https://www.bbc.com/news/world-asia-36253612>

¹⁸ *ibid*

¹⁹ GMA News, 2022, SWS: Duterte gets 'very good' net satisfaction rating, dikutip dari: <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/821217/sws-duterte-gets-very-good-net-satisfaction-rating/story/>

Dengan besarnya dukungan dan kepuasan atas awal masa pemerintahannya, hal tersebutlah yang membuat Presiden Duterte merasa memiliki legitimasi yang kuat dalam politik dalam negeri Filipina. Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 menunjukkan bahwa di dalam Pemerintahan Filipina saat ini Duterte memiliki posisi yang kuat, sehingga Duterte tidak takut untuk membuat kebijakan yang terkesan kontroversial. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah merenggangkan hubungan luar negeri dengan AS yang notabene merupakan Sekutu dari negara Filipina dalam beberapa dekade terakhir.

Rodrigo Duterte menjadikan beberapa survei dan penolakan campur tangan Amerika Serikat oleh masyarakat Filipina untuk kepentingan urusan domestik Filipina semacam ini sebagai landasan pemikiran bahwa masyarakat menerima kebijakannya bahkan dalam metode pelaksanaannya telah memakan korban yang tidak sedikit.

Yang **kedua** adalah kasus COVID-19 di Filipina yang menjadi alasan utama Duterte untuk melanjutkan kerjasama VFA dengan Amerika melalui beberapa persyaratan yang di setujui kedua belah pihak.

Krisis kesehatan global memberikan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pemimpin untuk memikul tanggung jawab yang luas dalam kebijakan mereka. Beberapa dari mereka tetap memilih untuk memanfaatkan saat kritis ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan masing-masing negara.

Sejak kasus pertama tercatat, pemerintah Filipina telah meningkatkan respons multi-sektoral terhadap keadaan darurat COVID-19 yang diarahkan oleh gugus tugas antar lembaga di Filipina. *The National Action Plan* (NAP) bertujuan untuk menahan penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonominya. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah termasuk karantina komunitas di Metro Manila yang diperluas ke Luzon serta provinsi lainnya.²⁰

Pandemi COVID-19, tanpa diragukan lagi, telah membuat kewalahan dunia dengan ketidakpastian yang luar biasa. Konsekuensinya juga melampaui masalah kesehatan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana krisis ini dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk memperluas kendali mereka atas rakyat. Di Filipina pandemi telah dimanfaatkan oleh Presiden Duterte untuk mengkonsolidasikan rezimnya. Hal ini dicapai dengan instrumentalisasi aparaturs koersif, khususnya PNP (*Philippine National Police*) dengan tujuan untuk

²⁰ The Philippines Humanitarian Country Team (HCT), 2021, COVID-19 HUMANITARIAN RESPONSE PLAN PHILIPPINES

memperkuat aura tak terkalahkan negara. Polisi diberikan posisi kewenangan di dalam aparaturnya penanggulangan pandemi negara, dengan ketentuan: kelonggaran yang lebih luas untuk menggunakan kekerasan melalui anti-terorisme yang kontroversial dalam hukum, dan dimobilisasi untuk menegakkan tindakan-tindakan yang dipaksakan oleh pemerintah.²¹

Oleh karena itu, di tengah pandemi di Filipina, beberapa kebebasan sipil dilanggar dengan tujuan agar eksekutif otoritas Duterte ditingkatkan. Duterte bahkan tetap menekankan bahwa kampanye terhadap obat-obatan terlarang terus berlanjut bahkan di tengah pandemic.

Meski begitu masyarakat Filipina percaya bahwa Rodrigo Duterte telah berhasil mengamankan Filipina dari COVID-19. Hal ini dicapai dengan memenuhi tiga elemen utama dari sekuritisasi, yaitu; identifikasi atas ancaman eksistensial, memberlakukan tindakan darurat, dan menetapkan pelanggaran terhadap aturan. Sekuritisasi COVID-19 mengandalkan media untuk melakukan *framing* bahwa pandemi adalah perang atau pertarungan untuk kelangsungan hidup bangsa. Ini digunakan untuk membenarkan tanggapan dari pemerintah dalam upaya untuk menekan penyebaran virus.²²

Kebijakan Rodrigo Duterte ini dicapai dengan memanfaatkan dan memperluas kekuasaan aparat penegak hukum negara. Meskipun Duterte telah berhasil mengamankan COVID-19, ia melakukannya dengan cara yang bisa dibilang tidak lazim. Tindakan pengamanan Duterte mengandalkan pada retorika populisnya, atau dapat disebut sebagai tindakan sekuritisasi populis. Dilihat dengan cara ini, retorika populis Duterte berfungsi sebagai tindak tutur yang mendukung dan melegitimasi sekuritisasi COVID-19. Elemen kunci dari tindakan sekuritisasi populisnya adalah memproyeksikan Filipina di bawah pengepungan oleh ancaman jahat yang dapat merusak kesejahteraan orang Filipina.²³

Pada Juli 2021, Filipina menerima lebih dari tiga juta dosis vaksin Johnson & Johnson dari AS. Pada 16 dan 17 Juli 2021 akan menerima tiga juta dosis lagi pada bulan berikutnya, kali ini vaksin Moderna. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengakui bahwa sumbangan Amerika Serikat untuk vaksin COVID-19 yang

²¹ Bajo, A. F. (2020, April 17). More cops will be deployed after Duterte's warning of police, military takeover—Año. GMA News Online. <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/734414/more-cops-will-be-deployed-after-duterte-swarming-of-police-military-takeover-ano/story>

²² *ibid*

²³ Bajo, A. F., Op. cit.

mendorongnya untuk mempertahankan VFA setelah berulang kali mengancam untuk membatalkannya.²⁴

Keputusan Duterte untuk mengakhiri ketidakpastian atas nasib VFA yang mengatur kerangka bagi kehadiran pasukan AS di Filipina untuk latihan perang dan kegiatan bersama lainnya akhirnya Duterte memutuskan untuk membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut. Duterte juga secara terbuka menetapkan persyaratan untuk kelanjutan VFA menuntut, pertama, vaksin COVID-19, dan kemudian “pembayaran” untuk VFA.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisa bahwa dengan dukungan yang masif dari masyarakat Filipina menjadi alasan utama Rodrigo Duterte mempertahankan kampanye *War on Drugs* dan mengancam kerjasama militernya dengan AS. Dua kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat Filipina dari aspek keamanan, namun memiliki dampak populisme karena harapan masyarakat Filipina terhadap penumpasan pengguna narkoba sudah tercapai dan terbawa *euphoria* akibat tindakan tegas Rodrigo Duterte yang menolak AS ikut campur urusan dalam negeri Filipina. Dengan mempertahankan *war on drugs* dan menantang AS di kasus VFA secara tidak langsung Duterte juga mengamankan citra tegas dan agresifnya sebagai Presiden Filipina.

Rodrigo Duterte juga menggunakan VFA sebagai alat *bargaining* untuk mendapatkan *leverage* dalam menangani kasus COVID-19 tersebut dengan cara mengakhiri ketidakpastian VFA dan sebagai gantinya mendapatkan sejumlah besar vaksin untuk masyarakatnya.

²⁴ Pia Ranada, RAPPLER, 2021. Duterte says US vaccine donations led him to keep VFA, dikutip dari; <https://www.rappler.com/nation/duterte-says-united-states-vaccine-donations-decision-keep-vfa/>